



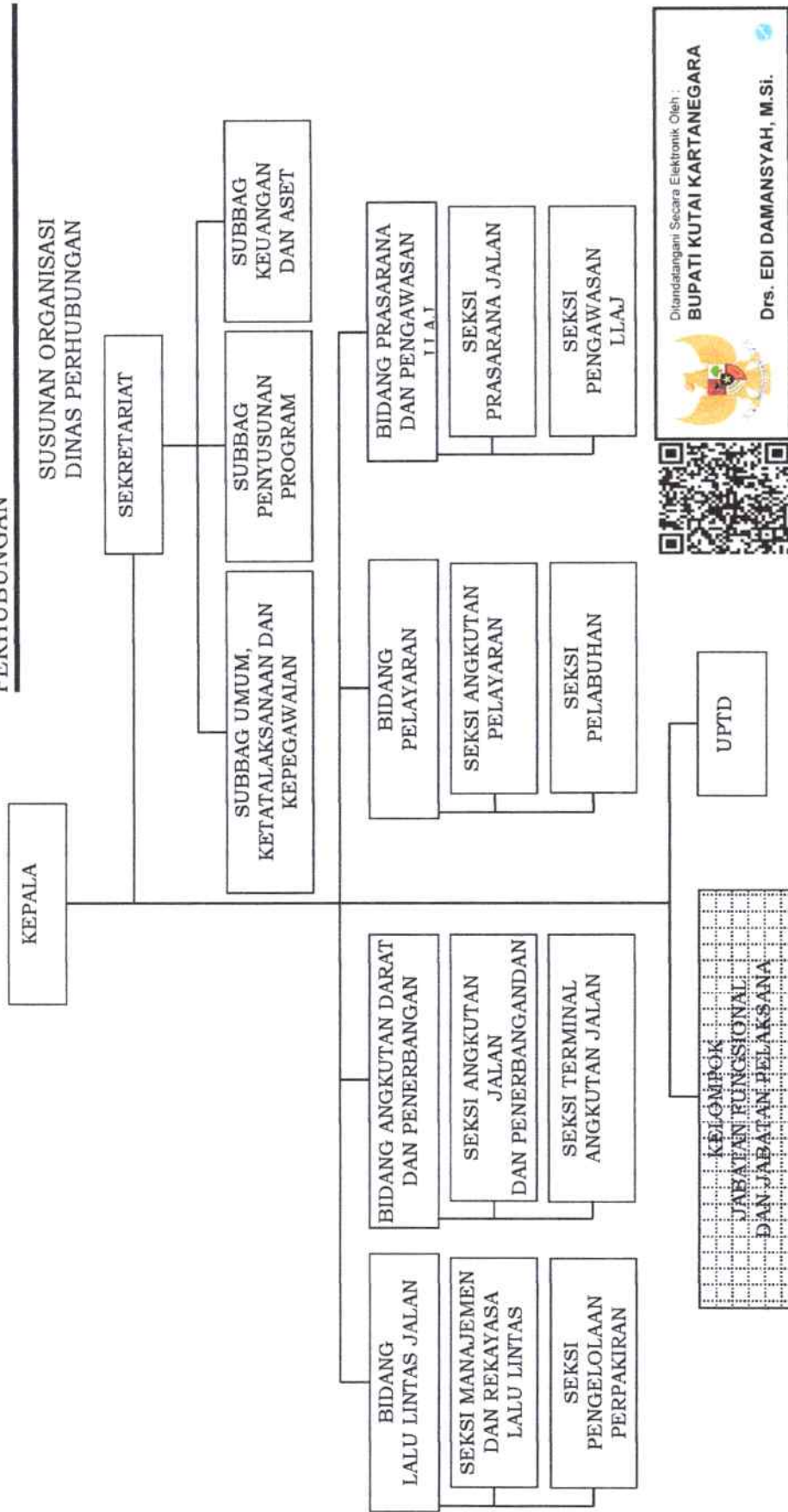
# DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026



TENGGARONG,  
2 JANUARI 2026

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
 NOMOR 60 TAHUN 2023 TANGGAL 11 OKTOBER 2023  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
 PERHUBUNGAN



Diandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**



**Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AHMAD JUNAIDI, S.Pd.,M.M.**

Jabatan : **KEPALA DINAS**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **dr. AULIA RAHMAN BASRI, M. Kes**

Jabatan : **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung kemandirian fiskal daerah serta pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik.

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

**Pihak kedua:**

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

2. penghargaan dan sanksi. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

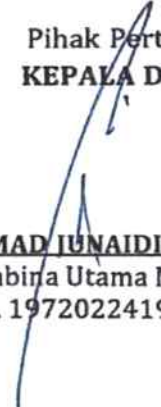
Kutai Kartanegara, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,  
**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**



dr. AULIA RAHMAN BASRI. M. Kes

Pihak Pertama,  
**KEPALA DINAS**



AHMAD IUNAI. S.Pd.M.M.  
Pembina Utama Muda(IV/c)  
NIP. 197202241992031006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Antar Wilayah	Rasio Konektivitas Kabupaten	Persen	0,722
2	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Daerah	Kinerja lalu lintas Kabupaten	Rasio	0,421
3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan	Rupiah	990.000.000,-
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai	4,01
5	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
6	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
7	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
8	Terlaksananya Kepatuhan Input e- Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN ( Rp )</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	46.176.216.681,60	APBD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	107.750.000.000,00	APBD
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	200.000.000,00	APBD
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>		<b>154.126.6.816,60</b>	


Kutai Kartanegara, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,  
**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**



**dr. AULIA RAHMAN BASRI, M. Kes**

Pihak Pertama,  
**KEPALA DINAS**



**AHMAD JUNAIDI, S.Pd., M.M.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197202241992031006



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : YUDI APIDIANTARA, S.T.,M.T**  
**Jabatan : SEKRETARIS**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

**Nama : AHMAD JUNAIDI, S.Pd.,M.M**  
**Jabatan : KEPALA DINAS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung kemandirian fiskal daerah serta pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik.

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

2. penghargaan dan sanksi. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas

**AHMAD JUNAIDI, S.Pd., M.M**  
Pembina Utama Muda - IV/c  
NIP. 19720224 199203 1 006

Pihak Pertama,  
Sekretaris

**YUDI APIDIANTARA, S.T., M.T**  
Pembina Tingkat I - IV/b  
NIP. 19720829 199803 1 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan	Rupiah	990.000.000,-
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai	4,01
3	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
4	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
5	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
6	Terlaksananya Kepatuhan Input e- Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	60
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4
	2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	336
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1
	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	12
	5. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1
	6. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2
	8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
	9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4
	10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2
	11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2
	12. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1
	13. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5
	14. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2
	15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	23
	16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	31
	17. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	167
	18. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2
	19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000,00
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.035.767.682,00
3.	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	175.680.000,00
5.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	25.000.000,00
6.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.400.000,00
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000,00
8.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.500.000,00
9.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	550.000.000,00
10.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000,00
11.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.137.000,00
12.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	150.000.000,00
13.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.745.000.000,00
14.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.601.724.000,00
15.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000,00
16.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.300.000.000,00
17.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	105.000.000,00
18.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.228.000,00
19.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	600.780.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>46.176.216.682,00</b>

Kutai Kartanegara, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas

**AHMAD JUNAIDI, S.Pd.,M.M**  
Pembina Utama Muda - IV/c  
NIP. 19720224 199203 1 006

Pihak Pertama,  
Sekretaris

**YUDI APIDIANTARA, S.T.,M.T**  
Pembina Tingkat I- IV/b  
NIP. 19720829 199803 1 010



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : **HANDOKO, S.Sos**  
**Jabatan** : **KASUBBAG UMUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

**Nama** : **YUDI APIDIANTARA, S.T.,M.T**  
**Jabatan** : **SEKRETARIS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik.
3. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

4. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
5. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
6. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
7. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
8. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

2. penghargaan dan sanksi. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Pihak Kedua,  
Sekretaris



**YUDI APIDIANTARA, S.T.,M.T**  
Pembina Tingkat I - IV/b  
NIP. 19720829 199803 1 010

Kutai Kartanegara, 2 Januari 2026  
Pihak Pertama,  
Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan  
Dan Kepegawaian



**HANDOKO, S.Sos**  
Penata - III/c  
NIP. 19760913 200701 1 018

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai	4,01
2	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
3	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
4	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
5	Terlaksananya Kepatuhan Input e- Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	60
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2
	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2
	6. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1
	7. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5
	8. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2
	9. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	23

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	31
	11. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	167
	12. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2
	13. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000,00
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.500.000,00
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	550.000.000,00
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000,00
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.137.000,00
6.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	150.000.000,00
7.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.745.000.000,00
8.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.601.724.000,00
9.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000,00
10.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.300.000.000,00
11.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	105.000.000,00

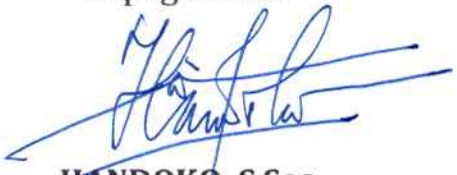
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
12.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.228.000,00
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	600.780.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>19.867.369.000,00</b>

Kutai Kartanegara, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Sekretaris

  
**YUDI APIDIANTARA, S.T.,M.T**  
Pembina Tingkat I - IV/b  
NIP. 19720224 199203 1 006

Pihak Pertama,  
Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan Dan  
Kepegawaian

  
**HANDOKO, S.Sos**  
Penata - III/c  
NIP. 19760913 200701 1 018



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SALASNAN, S.E.,M.S.i**  
Jabatan : **KASUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **YUDI APIDIANTARA, S.T.,M.T**  
Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung kemandirian fiskal daerah serta pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik.

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

2. penghargaan dan sanksi. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).


Kutai Kartanegara, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Sekretaris



**YUDI APIDIANTARA, S.T. M.T**  
Pembina Tingkat I - IV/b  
NIP. 19720829 199803 1 010

Pihak Pertama,  
Kasubbag Penyusunan Program



**SALASNAN, S.E., M.Si**  
Pembina - IV/a  
NIP. 19691223 200701 1 018

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
2	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
3	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
4	Terlaksananya Kepatuhan Input e- Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	60
	1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4

<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
1.	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>50.000.000,00</b>

Kutai Kartanegara, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Sekretaris

  
**YUDI APIDIANTARA, S.T.M.T**  
Pembina Tingkat I - IV/b  
NIP. 19720829 199803 1 010

Pihak Pertama,  
Kasubbag Penyusunan Program

  
**SALASNAN, S.E., M.Si**  
Pembina - IV/a  
NIP. 19691223 200701 1 018



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : DEDY HENDRATNO, S.H**  
**Jabatan : KASUBBAG KEUANGAN DAN ASET**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama  
**Nama : YUDI APIDIANTARA, S.T.,M.T**  
**Jabatan : SEKRETARIS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung kemandirian fiskal daerah serta pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik.
4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

**Pihak kedua:**

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

2. penghargaan dan sanksi. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Pihak Kedua,  
Sekretaris



**YUDY APIDIANTARA, S.T.,M.T**

Pembina Tingkat I - IV/b  
NIP. 19720829 199803 1 010

Kutai Kartanegara, 2 Januari 2026

Pihak Pertama,  
Kasubbag Keuangan Dan Aset



**DEDY HENDRATNO, S.H**

Penata Tingkat I- III/d  
NIP. 19720625 200012 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan	Rupiah	990.000.000,-
2	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
3	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
4	Terlaksananya Kepatuhan Input e- Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	60
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	336
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	12
	4. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1
	5. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1

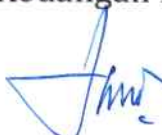
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.035.767.682,00
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	175.680.000,00
4.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	25.000.000,00
5.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.400.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>26.258.847.682,00</b>

Kutai Kartanegara, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Sekretaris

  
**YUDI APIDIANTARA, S.T.M.T**  
Rembina Tingkat I - IV/b  
NIP. 19720224 199203 1 006

Pihak Pertama,  
Kasubbag Keuangan Dan Aset

  
**DEDY HENDRATNO, S.H**  
Penata Tingkat I - III/d  
NIP. 19720625 200012 1 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IRWAN SUKARTA, S.E.,M.T**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG LALU LINTAS JALAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AHMAD JUNAIDI, S.Pd.,M.M**  
Jabatan : **KEPALA DINAS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung kemandirian fiskal daerah serta pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik.

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

2. penghargaan dan sanksi. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas

**AHMAD JUNAIDI, S.Pd., M.M**  
Pembina Utama Muda - IV/c  
NIP. 19720224 199203 1 006

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan

**IRWAN SUKARTA, S.E., M.T**  
Pembina Tingkat I - IV/b  
NIP. 19770314 200012 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Antar Wilayah	Rasio Konektivitas Kabupaten	Persen	0,722
2	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Daerah	Kinerja lalu lintas Kabupaten	Rasio	0,421
3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan	Rupiah	990.000.000,-
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai	4,01
5	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
6	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
7	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
8	Terlaksananya Kepatuhan Input e- Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	41,45
	1. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)	2
	2. Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas (Unit)	2

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	3.200.000.000,00
2.	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	4.300.000.000,00
	TOTAL	7.500.000.000,00

Kutai Kartanegara, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas

**AHMAD JUNAIDI, S.Pd.,M.M**  
Pembina Utama Muda - IV/c  
NIP. 19720224 199203 1 006

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan

**IRWAN SUKARTA, S.E.,M.T**  
Pembina Tingkat I- IV/b  
NIP. 19770314 200012 1 001



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ABROR SUNGGUDI, S.Sos.,M.Ap**  
Jabatan : **KEPALA SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **IRWAN SUKARTA, S.E.,M.T**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG LALU LINTAS JALAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua  
Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung kemandirian fiskal daerah serta pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik.

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.


2. penghargaan dan sanksi. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan

  
**IRWAN SUKARTA, S.E., M.T**  
Pembina Tingkat I - IV/b  
NIP. 19770314 200012 1 001

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Manajemen Dan  
Rekayasa Lalu Lintas

  
**ABROR SUNGGUDI, S.Sos., M.Ap**  
Pembina - IV/a  
NIP. 19751210 200701 1 021

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Antar Wilayah	Rasio Konektivitas Kabupaten	Persen	0,722
2	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Daerah	Kinerja lalu lintas Kabupaten	Rasio	0,421
3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan	Rupiah	990.000.000,-
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai	4,01
5	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
6	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
7	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
8	Terlaksananya Kepatuhan Input e- Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	41,45
	1. Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas (Unit)	2


NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	4.300.000.000,00
	TOTAL	4.300.000.000,00

Kutai Kartanegara, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan

  
**IRWAN SUKARTA, S.E.,M.T**  
Pembina Tingkat I- IV/b  
NIP. 19770314 200012 1 001

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Manajemen Dan  
Rekayasa Lalu Lintas

  
**ABROR SUNGGUDI, S.S.os.,M.Ap**  
Pembina - IV/a  
NIP. 19751210 200701 1 021



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JULIANA, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA SEKSI PENGELOLAAN PERPAKIRAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **IRWAN SUKARTA, S.E.,M.T**

Jabatan : **KEPALA BIDANG LALU LINTAS JALAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua  
Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung kemandirian fiskal daerah serta pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik.

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.


2. penghargaan dan sanksi. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan

  
**IRWAN SUKARTA, S.E.,M.T**  
Pembina Tingkat I - IV/b  
NIP. 19770314 200012 1 001

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Pengelolaan Perpajakan

  
**IULIANA, S.Sos**  
Penata Tingkat I - III/d  
NIP. 19730711 200012 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Antar Wilayah	Rasio Konektivitas Kabupaten	Persen	0,722
2	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Daerah	Kinerja lalu lintas Kabupaten	Rasio	0,421
3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan	Rupiah	990.000.000,-
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai	4,01
5	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
6	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
7	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
8	Terlaksananya Kepatuhan Input e- Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	41,45
	1. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)	2

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	3.200.000.000,00
	TOTAL	3.200.000.000,00

Kutai Kartanegara, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan

  
**IRWAN SUKARTA, S.E., M.T**  
Pembina Tingkat I- IV/b  
NIP. 19770314 200012 1 001

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Pengelolaan Perpajakan

  
**JULIANA, S.S.os**  
Penata Tingkat I - III/d  
NIP. 19730711 200012 2 002



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. KENDARJO, S.T.,M.T**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG ANGKUTAN DARAT DAN PENERBANGAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AHMAD JUNAIDI, S.Pd.,M.M**  
Jabatan : **KEPALA DINAS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung kemandirian fiskal daerah serta pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik.

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Antar Wilayah	Rasio Konektivitas Kabupaten	Persen	0,722
2	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Daerah	Kinerja lalu lintas Kabupaten	Rasio	0,421
3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan	Rupiah	990.000.000,-
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai	4,01
5	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
6	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
7	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
8	Terlaksananya Kepatuhan Input e- Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Konektivitas Darat (Rasio)	0,113
1. -		-	0
2. -		-	0

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1. -		0.00
2. -		0.00
	TOTAL	0,00

Kutai Kartanegara, 6 Februari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas

**AHMAD JUNAIDI, S.Pd., M.M**  
Pembina Utama Muda - IV/c  
NIP. 19720224 199203 1 006

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Angkutan Darat Dan  
Penerbangan

**KENDARIO, S.T., M.T**  
Pembina - IV/a  
NIP. 19730526 200312 1 004

2. penghargaan dan sanksi. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 6 Februari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Angkutan Darat Dan  
Penerbangan

**AHMAD JUNAILI S.Pd.M.M**

Pembina Utama Muda - IV/c  
NIP. 19720224 199203 1 006

**H. KENDARJO. S.T.M.T**

Pembina - IV/a  
NIP. 19730526 200312 1 004



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AHYAD RYDHONY. SE**  
Jabatan : **KEPALA SEKSI ANGKUTAN JALAN DAN PENERBANGAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. KENDARJO, S.T.,M.T**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG ANGKUTAN DARAT DAN PENERBANGAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung kemandirian fiskal daerah serta pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik.

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

2. penghargaan dan sanksi. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 6 Februari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Angkutan Darat Dan  
Penerbangan



**H. KENDARJO. S.T.,M.T**  
Pembina - IV/a  
NIP. 19730526 200312 1 004

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Angkutan Jalan Dan  
Penerbangan



**AHYAD RYDHONY. SE**  
Penata Tingkat I - III/d  
NIP. 19700922 200112 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Antar Wilayah	Rasio Konektivitas Kabupaten	Persen	0,722
2	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Daerah	Kinerja lalu lintas Kabupaten	Rasio	0,421
3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan	Rupiah	990.000.000,-
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai	4,01
5	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
6	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
7	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
8	Terlaksananya Kepatuhan Input e- Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Konektivias Darat (Rasio)	0,113
1. -	-	-	0
2. -	-	-	0

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1. -	-	0.00
2. -	-	0.00
	TOTAL	0,00

Kutai Kartanegara, 6 Februari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Angkutan Darat Dan  
Penerbangan

  
**H. KENDARJO, S.T.,M.T**  
Pembina - IV/a  
NIP. 19730526 200312 1 004

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Angkutan Jalan Dan  
Penerbangan

  
**AHYAD RYDHONY, S.E**  
Penata Tingkat I - III/d  
NIP. 19700922 200112 1 002



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RAKHMADANI HIDAYAT, S.IP, M.Si**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG PELAYARAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AHMAD JUNAIDI, S.Pd.,M.M**  
Jabatan : **KEPALA DINAS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung kemandirian fiskal daerah serta pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik.

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Antar Wilayah	Rasio Konektivitas Kabupaten	Persen	0,722
2	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Daerah	Kinerja lalu lintas Kabupaten	Rasio	0,421
3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan	Rupiah	990.000.000,-
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai	4,01
5	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
6	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
7	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
8	Terlaksananya Kepatuhan Input e- Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

2. penghargaan dan sanksi. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 6 Februari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Pelayaran

**AHMAD JUNAIDI, S.Pd., M.M**

Pembina Utama Muda - IV/c  
NIP. 19720224 199203 1 006

**RAKHMADANI HIDAYAT, S.IP., M.Si**

Pembina - IV/a  
NIP. 19880429 200701 1 003

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Konektivitas Sungai, Danau (Rasio)	0,609
	1. Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara (Unit)	1

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	200.000.000,00
	TOTAL	200.000.000,00

Kutai Kartanegara, 6 Februari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Pelayaran

**AHMAD JUNAI DL S.Pd.,M.M**  
Pembina Utama Muda - IV/c  
NIP. 19720224 199203 1 006

**RAKHMADANI HIDAYAT, S.IP.,M.Si**  
Pembina - IV/a  
NIP. 19880429 200701 1 003



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NUZUL HIDAYAT**  
Jabatan : **KEPALA SEKSI PELAYARAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RAKHMADANI HIDAYAT, S.IP, M.Si**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG PELAYARAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung kemandirian fiskal daerah serta pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik.

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

2. penghargaan dan sanksi. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Pelayaran

**RAKHMADANI HIDAYAT, S.IP.,M.Si**

Pembina - IV/a  
NIP. 19880429 200701 1 003

Kutai Kartanegara, 6 Februari 2026

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Pelayaran



**NUZUL HIDAYAT**

Penata Tingkat I - III/d  
NIP. 19681208 199203 1 013

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Antar Wilayah	Rasio Konektivitas Kabupaten	Persen	0,722
2	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Daerah	Kinerja lalu lintas Kabupaten	Rasio	0,421
3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan	Rupiah	990.000.000,-
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai	4,01
5	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
6	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
7	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
8	Terlaksananya Kepatuhan Input e- Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Konektivitas Sungai, Danau (Rasio)	0,609
	1. Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara (Unit)	1

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	200.000.000,00
	TOTAL	200.000.000,00

Kutai Kartanegara, 6 Februari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Pelayaran

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Pelayaran

**RAKHMADANI HIDAYAT, S.IP.,M.Si**

Pembina - IV/a  
NIP. 19880429 200701 1 003

**NUZUL HIDAYAT**

Penata Tingkat I - III/d  
NIP. 19681208 199203 1 013



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD FATWA, S.T**  
Jabatan : **KEPALA SEKSI PELABUHAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RAKHMADANI HIDAYAT, S.IP, M.Si**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG PELAYARAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung kemandirian fiskal daerah serta pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik.

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

2. penghargaan dan sanksi. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 6 Februari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Pelayaran

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Pelayaran

**RAKHMADANI HIDAYAT, S.IP., M.Si**

Pembina - IV/a  
NIP. 19880429 200701 1 003

**MUHAMMAD FATWA, S.T**

Penata Tingkat I - III/d  
NIP. 19810917 200604 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Antar Wilayah	Rasio Konektivitas Kabupaten	Persen	0,722
2	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Daerah	Kinerja lalu lintas Kabupaten	Rasio	0,421
3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan	Rupiah	990.000.000,-
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai	4,01
5	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
6	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
7	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
8	Terlaksananya Kepatuhan Input e- Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Konektivitas Sungai, Danau (Rasio)	0,609
1. -	-	-	0

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1. -	-	0,00
	TOTAL	0,00

Kutai Kartanegara, 6 Februari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Pelayaran

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Pelabuhan

**RAKHMADANI HIDAYAT, S.IP.,M.Si**

Pembina - IV/a  
NIP. 19880429 200701 1 003

**MUHAMMAD FATWA, S.T**

Penata Tingkat I - III/d  
NIP. 19810917 200604 1 008



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RAHMAD FITRIADI, S.E**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA DAN PENGAWASAN  
LLAJ**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AHMAD JUNAIDI, S.Pd.,M.M**  
Jabatan : **KEPALA DINAS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung kemandirian fiskal daerah serta pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik.

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

2. penghargaan dan sanksi. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas

**AHMAD JUNAI DL, S.Pd., M.M**

Pembina Utama Muda - IV/c  
NIP. 19720224 199203 1 006

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Sarana Prasarana Dan  
Pengawasan LLAJ



**RAHMAD FITRIADI, S.E**

Pembina - IV/a  
NIP. 19840629 200901 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Antar Wilayah	Rasio Konektivitas Kabupaten	Persen	0,722
2	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Daerah	Kinerja lalu lintas Kabupaten	Rasio	0,421
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai	4,01
4	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
5	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
6	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
7	Terlaksananya Kepatuhan Input e- Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	41,45
	1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	1.898
	2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	0
	3. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	6

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100.250.000.000,00
2.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	0
3.	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	0
	TOTAL	100.250.000.000,00

Kutai Kartanegara, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas

**AHMAD JUNAIDI, S.Pd., M.M**  
Pembina Utama Muda - IV/c  
NIP. 19720224 199203 1 006

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Sarana Prasarana Dan  
Pengawasan LLAJ

**RAHMAD FITRIADI, S.E**  
Pembina - IV/a  
NIP. 19840629 200901 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **OBAJA ALEXANDER, S.TS.S.STP, M.Si**  
Jabatan : **KEPALA SEKSI PRASARANA JALAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RAHMAD FITRIADI, S.E**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA DAN PENGAWASAN LLAJ**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung kemandirian fiskal daerah serta pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik.

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

2. penghargaan dan sanksi. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Sarana  
Prasarana Dan Pengawasan LLAJ



**RAHMAD FITRIADI, S.E**  
Pembina - IV/a  
NIP. 19840629 200901 1 002

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Prasarana Jalan



**OBAJA ALEXANDER, S.TS.S.STP. M.Si**  
Pembina - IV/a  
NIP. 19841027 200212 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Antar Wilayah	Rasio Konektivitas Kabupaten	Persen	0,722
2	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Daerah	Kinerja lalu lintas Kabupaten	Rasio	0,421
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai	4,01
4	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
5	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
6	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
7	Terlaksananya Kepatuhan Input e- Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	41,45
	1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	1.898

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100.250.000.000,-
	TOTAL	100.250.000.000,-

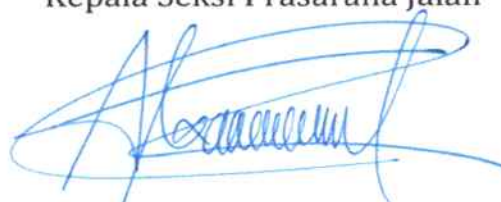
Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Sarana Prasarana Dan  
Pengawasan LLAJ



**RAHMAD FITRIADI S.E**  
Pembina - IV/a  
NIP. 19840629 200901 1 002

Kutai Kartanegara, 2 Januari 2026

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Prasarana Jalan



**OBAJA ALEXANDER.S.TS.S.STP. M.Si**  
Pembina - IV/a  
NIP. 19841027 200212 1 002



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HERU SETIAWAN, SE**  
Jabatan : **KEPALA SEKSI PENGAWASAN LLAJ**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RAHMAD FITRIADI, S.E**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA DAN PENGAWASAN LLAJ**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung kemandirian fiskal daerah serta pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik.

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

2. penghargaan dan sanksi. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,  
**Kepala Bidang Sarana  
Prasarana Dan Pengawasan  
LLAJ**



**RAHMAD FITRIADI, S.E**  
Pembina - IV/a  
NIP. 19840629 200901 1 002

Pihak Pertama,  
**Kepala Seksi Pengawasan LLAJ**



**HERU SETIAWAN, SE**  
Penata Tingkat I - III/d  
NIP. 19770530 199703 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Antar Wilayah	Rasio Konektivitas Kabupaten	Persen	0,722
2	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Daerah	Kinerja lalu lintas Kabupaten	Rasio	0,421
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai	4,01
4	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
5	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
6	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
7	Terlaksananya Kepatuhan Input e- Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	41,45
	1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	0
	2. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	0

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	0
2.	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	0
	TOTAL	0

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Sarana Prasarana Dan  
Pengawasan LLAJ



**RAHMAD FITRIADI, S.E**  
Pembina - IV/a  
NIP. 19840629 200901 1 002

Kutai Kartanegara, 2 Januari 2026

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Pengawasan LLAJ



**HERU SETIAWAN, SE**  
Penata Tingkat I - III/d  
NIP. 19770530 199703 1 005



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IWAN EFFENDI, S.S.Sos.**  
Jabatan : KEPALA UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AHMAD JUNAIDI, S.Pd.,M.M  
Jabatan : KEPALA DINAS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung kemandirian fiskal daerah serta pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik.

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

2. penghargaan dan sanksi. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas

Pihak Pertama,  
**Kepala UPT Pengujian Kendaraan  
Bermotor**

**AHMAD JUNAIDI, S.Pd., M.M**  
Pembina Utama Muda - IV/c  
NIP. 19720224 199203 1 006

  
**IWAN EFFENDI, S.Sos**  
Penata Tingkat I - III/d  
NIP. 19760616 199803 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Antar Wilayah	Rasio Konektivitas Kabupaten	Persen	0,722
2	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Daerah	Kinerja lalu lintas Kabupaten	Rasio	0,421
3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan	Rupiah	990.000.000,-
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai	4,01
5	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
6	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
7	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
8	Terlaksananya Kepatuhan Input e- Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Konektivitas Darat (Rasio)	0,113
1. -	-	-	0
2. -	-	-	0

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1. -	-	0,00
2. -	-	0,00
	TOTAL	0,00

Kutai Kartanegara, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas

**AHMAD JUNAIDI, S.Pd., M.M**  
Pembina Utama Muda - IV/c  
NIP. 19720224 199203 1 006

Pihak Pertama,  
Kepala UPT Pengujian Kendaraan  
Bermotor

**IWAN EFFENDI, S.Sos**  
Penata Tingkat I- III/d  
NIP. 19760616 199803 1 003



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUDIBYO, A.Md**  
Jabatan : **KEPALA TU. UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **IWAN EFFENDI, S.Sos.**  
Jabatan : **KEPALA UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung kemandirian fiskal daerah serta pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik.

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.


2. penghargaan dan sanksi. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala UPT Pengujian Kendaraan  
Bermotor

  
**IWAN EFFENDI, S.Sos**  
Penaata Tingkat I - III/d  
NIP. 19760616 109803 1 003

Pihak Pertama,  
**Kepala TU UPT Pengujian  
Kendaraan Bermotor**

  
**SUDIBYO, A.Md**  
Penata - III/c  
NIP. 19771026 200604 1 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Antar Wilayah	Rasio Konektivitas Kabupaten	Persen	0,722
2	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Daerah	Kinerja lalu lintas Kabupaten	Rasio	0,421
3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan	Rupiah	990.000.000,-
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai	4,01
5	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
6	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
7	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
8	Terlaksananya Kepatuhan Input e- Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Konektivitas Darat (Rasio)	0,113
1. -	-	-	0
2. -	-	-	0


NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1. -	-	0,00
2. -	-	0,00
	TOTAL	0,00

Kutai Kartanegara, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala UPT Pengujian Kendaraan  
Bermotor

  
**IWAN EFFENDI, S.Sos**  
Penata Tingkat I - III/d  
NIP. 19760616 199803 1 003

Pihak Pertama,  
Kepala TU UPT Pengujian Kendaraan  
Bermotor

  
**SUDIBYO, A.Md**  
Penata - III/c  
NIP. 19771026 200604 1 010